

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar Visi, Misi dan program yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai atau terealisasi maka harus ada dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan Renstra akan menghasilkan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi penganggaran. Pagu indikatif anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang akan berlaku selama lima tahun. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan program pembangunan daerah.

Sejalan dengan pagu atau plafon anggaran yang dialokasi untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena kondisiketerbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangannya. Kegiatan pembangunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan pembiayaan dari 1 (satu) sumber yaitu APBD Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Provinsi Sumatera Selatan sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sejalan dengan semakin baiknya kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

Isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Pengembangan potensi, inovasi, dan daya saing desa/kelurahan
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
3. Program pembangunan desa
4. Revitalisasi dan Transformasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
5. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan BUMDesa/Ma

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap

pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran strategi yaitu “*meningkatnya kualitas pemberdayaan desa dan meningkatnya usaha ekonomi masyarakat*”.

Rencana Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target
1	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	%	95%
2	Persentase musyawara perencanaan pembangunan Desa	%	95%
3	Persentase kader PKK Aktif	%	0,35%
4	Jumlah Desa Tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan	%	35%
5	Pembangunan Desa Sumatera Selatan	%	13%
6	Indek Desa Membangun Sumatera Selatan	%	0,670%

Adapun tabel Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan			Indikator	Pagu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (100%)	Rp 13,074,977,131
	A.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun</i>	<i>Rp 230,000,000</i>
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 85,000,000
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 40,000,000
		3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 30,000,000

		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 75,000,000
	B.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase dokumen penganggaran dan keuangan yang tersusun (100%)</i>	Rp 8,086,954,445
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7,642,717,517
		2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 327,780,000
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 63,016,928
		4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 53,440,000

	C.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan	Rp 50,000,000
		1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 50,000,000
	D.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran	Rp 2,015,332,106
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 60,000,000
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 42,000,000
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 85,000,000
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 90,000,000
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 20,000,000

		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 150,000,000
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1,568,332,106
	E.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp 150,000,000</i>
		1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 150,000,000
	F.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp 1,749,690,580</i>
		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 32,000,000
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 360,000,000
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 1,357,690,580

	G.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusam Pemerintah Daerah</i>	Rp 793,000,000
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp 83,000,000
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 397,000,000
		3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 90,000,000
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 223,000,000
II.	PROGRAM PENATAAN DESA			<i>Persentase Fasilitas Penataan Desa</i>	Rp 100,000,000
	A.	<i>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan</i>		<i>Persentase Penataan Desa yang Terfasilitasi</i>	Rp 100,000,000

			<i>Kepala Desa dan Desa Adat</i>		
		1.	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Rp 100,000,000
III.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			<i>Persentase Fasilitasi Penataan Desa</i>	Rp 950,000,000
	A.	<i>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>		<i>Persentase Kerjasama Antar Desa yang Terfasilitasi</i>	Rp 950,000,000

		1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Jumlah dokumen hasil fasilitas pembangunan kawasan perdesaan (Penilaian BumdesMa terbaik tingkat provinsi sumatera selatan) 2. Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan(fasilitas pelatihan manajemen dan keuangan BumdesMA) 3. Jumlah dokumen hasil fasilitas pembangunan kawasan perdesaan (Inisiasi kerjasama antar desa) 4.jumlah dokumen peningkatan peran pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya lokal kawasan perdesaan	Rp 950,000,000
IV.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			<i>1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa</i>	Rp 1,196,000,000
	A.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		<i>Persentase Dokumen hasil pembinaan manajemen pemerintahan desa</i>	Rp 1,196,000,000
		1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 800,000,000

		2	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	Rp 200,000,000
		3	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	Rp 181,000,000
		4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 15,000,000
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)	Rp 4,723,757,951
	A.	<i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase jumlah dokumen dan lembaga hasil pemberdayaan desa</i>	<i>Rp 4,723,757,951</i>

		1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, Rw, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna (posyandu) 2. Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yg ditibggalkan kapasitas kelembagaanya (KPM desa) 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, Dan karang taryuna (desa anti korupsi 4. Jumlah Lembaga kemaysarkart desa/keluraan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, Dan karang taruna (pelatian kader pembangunan desa	Rp	400,000,000
--	--	----	--	--	----	-------------

		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah dokumen hasil Fasilitas pengegembangan usaha ekonimi masyrakat dan pemerintan desa dalam meningkatkan pendapatan asil desa 2.Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan usaha ekonomi mayarkat dan pemerintah desa dalam meningkatkan prndapatan asil desa (pendapatan deerah pontensi desa wisata unggul)	Rp 125,940,951
		3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah dokumen hasil fasilitas pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tempat guna (nominatur pemenang TTG) 2. Jumlah dokumen hasil fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (nominator)	Rp 625,150,000
		5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 3,572,667,000
					Rp 20,044,735,082

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja, dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi, mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang diberdayakan	96 %
		Persentase kader PKK aktif	40 %
2	Meningkatnya pembangunan desa dan akses antar wilayah perdesaan untuk mempermudah mobilitas penduduk desa	Indeks desa membangun	0,6850
3	Meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di desa tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal di Sumatera Selatan yang Diberdayakan	1 %
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Masyarakat Yang Ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa	97 %
5	Meningkatnya fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah presentase fasilitasi pembangunan di kawasan perdesaan	97 %

Adapun perjanjian kinerja perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET
1	Tujuan Meningkatnya Fasilitasi Kualitas Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	Persentase	20,18
2	Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persentase	15
	Meningkatnya Jumlah Desa Maju	Persentase Desa Maju	Persentase	36